

## Kata Pengantar



Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2015.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Februari 2016  
Direktur Jenderal

Muladno

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia.....	7
1.5. Dukungan Anggaran .....	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan .....	8
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) .....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	13
2.3. Perjanjian Kinerja .....	14
2.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKH Tahun 2014 oleh Inspektorat Jenderal .....	15
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .....	16
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis.....	16
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	18
3.4. Kinerja Lainnya .....	31
3.5. Akuntabilitas Keuangan.....	34
3.6. Hambatan dan Kendala.....	35
3.7. Upaya dan Tindak Lanjut .....	39
<b>IV. PENUTUP</b> .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2015 .....	8
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
Tabel 3. Capaian Sasasaran Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 .....	16
Tabel 4. Produksi daging ternak lainnya tahun 2014-2015 .....	22
Tabel 5. Produksi telur tahun 2014-2015 .....	24
Tabel 6. Capaian produksi susu tahun 2014-2015 .....	26
Tabel 7. Pembebasan PHMS Prioritas Tahun 2010-2015 .....	28
Tabel 8. Perbandingan NTPT Tahun 2014-2015 .....	30
Tabel 9. Data Nilai Ekspor Obat Hewan Tahun 2010-2015 .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perjanjian Kinerja Dirjen PKH Tahun 2015 .....	15
Gambar 2. Grafik Populasi Ternak Tahun 2010-2015 .....	17
Gambar 3. Trend Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2010-2015 .....	18
Gambar 4. Trend Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2010-2015 .....	22
Gambar 5. Trend Produksi Telur Tahun 2010-2015 .....	26
Gambar 6. Trend Produksi Susu Tahun 2010-2015 .....	24
Gambar 7. Trend Jumlah Ekspor Ternak Babi Tahun 2010-2015 .....	29
Gambar 8. Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2011-2015	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	42
Lampiran 2. Rekapitulasi SDM Ditjen PKH Tahun 2010-2015 .....	43
Lampiran 3. Kegiatan tahun 2010-2015 dalam rangka peningkatan produksi Daging Sapi/Kerbau .....	44

## EXECUTIVE SUMMARY

Nawa cita Kabinet Jokowi-JK terkait kedaulatan pangan dan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional merupakan acuan kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu mempertimbangkan pula kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode sebelumnya.

Capaian sasaran strategis Ditjen PKH pada tahun 2015 termasuk kategori berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis delapan indikator yang rata-rata lebih dari 81%, dengan kisaran 56,3% – 105,85 %. Indikator yang memiliki capaian >100% adalah produksi daging sapi/kerbau, produksi susu, peningkatan status kesehatan hewan, jumlah sertifikat, dan nilai tukar peternakan. Sedangkan indikator yang capainnya <100% adalah produksi daging ternak lainnya, produksi telur, dan ekspor ternak hidup babi.

Selain kinerja utama yang tercantum dalam perjanjian kinerja, pada tahun 2015 Ditjen PKH telah mampu mewujudkan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan tersebut antara lain pemanfaatan Kapal Ternak KM Camara I untuk mengirim / mengangkut ternak sapi dari daerah sentra produksi seperti NTT, NTB dan Jatim ke daerah konsumsi di Jabodetabek, pembangunan Laboratorium BSL-3 di BBPMSOH Gunung Sindur – Bogor dalam rangka meningkatkan kemampuan pengujian vaksin untuk penanggulangan penyakit Avian Influenza di Indonesia, penerapan RPH rantai dingin, dan ekspor obat hewan ke kawasan Asia, Timur Tengah, ataupun Afrika.

Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 sebesar Rp 3,13 triliun. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2,24 triliun atau 71,45% dari total anggaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dari aspek manajemen dan administrasi antara lain: 1) ketersediaan laporan terkait data/informasi produksi dan distribusi DOC oleh Breeder ke wilayah lain tidak/belum dilaporkan dengan baik kepada

Dinas kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan di propinsi, 2) Dinamika arah kebijakan PKH yang berdampak pada: perubahan struktur organisasi, revisi anggaran kegiatan strategis yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Utamanya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa strategis yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan belum disosialisasikan dengan baik di daerah (propinsi, kabupaten dan UPT) serta terbatasnya jumlah dan pengalaman penyedia barang dan jasa, menyebabkan beberapa kegiatan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan yang pada akhirnya tidak dapat direalisasikan; 3) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan baik penetapan pengelola keuangan dan pelaksanaan tender; 4) Penyedia barang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan dan beberapa kelompok terkendala dengan peraturan Pemda tentang kelompok penerima bantuan ternak harus berbadan hukum; dan 5) Beberapa satker tidak mampu melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.

Sedangkan pada aspek teknis beberapa kendala yang ditemukan adalah: 1) Umur pejantan yang ada di Balai Inseminasi buatan rata-rata sudah tua (8-9 tahun), yang menyebabkan penurunan kualitas semen sehingga berakibat kepada penurunan jumlah produksi; 2) Regulasi yang belum tuntas perihal pemasukan sapi indukan (berubahnya Permentan 109 menjadi Permentan 48 dan kemudian Permentan 42); 3) Ketidaksiapan IKHS di Balikpapan menerima masuknya sapi impor dalam jumlah besar, sehingga terjadi kematian 152 ekor, dan mengakibatkan pihak Australia menunda pengiriman pada shipment berikutnya, sebelum IKHS diperbaiki; 4) Hilangnya momentum ketersediaan sapi di Australia dengan semakin mendekati akhir tahun jumlahnya semakin berkurang dan harga semakin tinggi; 5) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan, keterbatasan Sumber Daya Manusia kesehatan hewan baik jumlah maupun kualitasnya, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya penerapan pengawasan Lalu lintas hewan, dan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, dan 6) Keterbatasan jumlah SDM Kesmavet antara lain auditor NKV, Juleha, Butcher, AMPM, PPC, Pengawas Kmv. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendukung SDM bidang kesehatan masyarakat veteriner, baik dalam bentuk kelembagaan maupun penempatan SDM bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk mengatasi masalah tersebut akan ditempuh upaya dan tindak lanjut antara lain: 1) Melakukan replacement bull dengan tujuan mengganti pejantan yang sudah tua dengan yang muda guna meningkatkan produktifitas semen beku yang dihasilkan; 2) Berkoordinasi dengan Badan Karantina Pertanian terkait pelabuhan pemasukan dan menyiapkan IKH/IKHS, serta mempersiapkan kelompok penerima

khususnya terkait penyediaan pakan hijauan dan konsentrat; 3) Melakukan sinergitas kebijakan antara Pusat dan Daerah, sehingga pengambilan kebijakan di pusat dan di daerah dapat seragam; dan 4) Meningkatkan harmonisasi lintas sektoral.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Nawa cita Kabinet Jokowi-JK terkait kedaulatan pangan dan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional merupakan acuan kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu mempertimbangkan pula kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode sebelumnya.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kinerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 dapat dilihat dari aspek ekonomi makro serta teknis populasi dan produksi ternak. Dari sisi ekonomi makro yaitu PDB berdasarkan angka konstan meningkat sebesar 4,39%, sedangkan penyerapan tenaga kerja tumbuh sebesar 3,07% pada tahun yang sama selama periode tahun 2010 – 2013. Untuk investasi baik PMA maupun PMDN tumbuh sebesar Rp.44.125,0 juta rupiah dan PMA US\$ 15.964 ribu dollar. Kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak (NTP) mengalami peningkatan yang masih berada dikisaran 102. Sedangkan, pada aspek perdagangan ternak, peternakan dan kesehatan hewan masih mengalami devisa ekspor dibandingkan impor. Ditargetkan pada tahun 2015-2019 PDB sub sektor peternakan meningkat sebesar 3,86% per tahun, penyerapan tenaga kerja meningkat 0,23% per tahun, dan peningkatan investasi 17,26% per tahun.

Sedangkan dari sisi teknis, populasi ternak kurun waktu 2010-2014 rata-rata mengalami peningkatan kecuali kerbau yang menurun sebesar 24,91% per tahun. Dalam periode yang sama, untuk peningkatan produksi daging, semua jenis ternak

mengalami peningkatan kecuali produksi daging kambing yang menurun 1,60%, domba 3,93%, produksi susu mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,19% per tahun, dan produksi telur meningkat rata-rata 7% pertahun. Pada tahun 2015-2019, ditargetkan peningkatan populasi rata-rata 4,26% per tahun, peningkatan produksi daging 8,4% per tahun, peningkatan produksi telur 8,9% per tahun, dan peningkatan produksi susu 7,3% per tahun

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 dan memperhatikan capaian aspek ekonomi makro dan aspek teknis populasi dan produksi ternak, maka Ditjen PKH merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut: (1) Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal; (2) Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan; (3) Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis; (4) Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing; (5) Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan; (6) Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) Mendorong insentif peternakan; dan (9) Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak. Selama kurun waktu tersebut regulasi yang dibutuhkan banyak terkait dengan peraturan daerah yang mengatur: tataruang peternakan dan keswan; pengendalian pemotongan betina produktif; penetapan kawasan peternakan; pengembangan ternak dilahan sawit/hutan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen. Selain itu akan didorong dan diarahkan badan, instansi dan berbagai perusahaan untuk mengembangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi maka pada tahun anggaran 2015-2019 Ditjen PKH merumuskan program **Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**. Pemenuhan pangan asal ternak mengarah pada peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu), sedangkan agribisnis peternakan rakyat mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kegiatan utama yang akan diimplementasikan pada tahun 2015-2019 adalah kegiatan produksi bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan ternak, penanganan penyakit hewan menular strategis (PHMS), jaminan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan kegiatan dukungan manajemen teknis.

Pencapaian penyediaan pangan asal ternak juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, baik di pusat maupun daerah, sehingga tercapainya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan peternak.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap unit kerja diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun.

Laporan kinerja Ditjen PKH tahun 2015 adalah bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal PKH kepada Menteri Pertanian atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adalah tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen PKH selama tahun 2015. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## **1.3 Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, dan 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal didukung oleh 6 unit kerja eselon II di pusat, yaitu : (1) Direktorat Perbibitan Ternak; (2) Direktorat Pakan Ternak; (3) Direktorat Budidaya Ternak; (4) Direktorat Kesehatan Hewan; (5) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan (6) Sekretariat Direktorat Jenderal.

Masing-masing unit organisasi tersebut diatas mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Direktorat Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan non ruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak;
  - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan non ruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak;
  - (c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bibit ternak ruminansia dan non ruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak;
  - (d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bibit ternak ruminansia dan non ruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu dan pengembangan bibit ternak; dan
  - (e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan Ternak
- (2) Direktorat Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pakan ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan;
  - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan;

- (c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan;
  - (d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan; dan
  - (e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan Ternak
- (3) Direktorat Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Budidaya Ternak menyelenggarakan fungsi :
- (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
  - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
  - (c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
  - (d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; dan
  - (e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Ternak
- (4) Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
  - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
  - (c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan,

- perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
- (d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; dan
  - (e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
- (5) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen menyelenggarakan fungsi :
- (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
  - (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
  - (c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
  - (d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan; dan
  - (e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
- (6) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- (a) Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang kesehatan hewan;
- (b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- (c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- (d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- (e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada Agustus 2015, Organisasi Ditjen PKH berubah sesuai Permentan 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Ditjen PKH terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, namun pelaksanaan program dan kegiatan masih mengikuti organisasi sebelumnya.

#### **1.4 Sumber Daya Manusia**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen PKH tahun 2015 sebanyak 2.266 orang, yang terdiri dari:

- 1) Jumlah pegawai menurut Eselon II: Sekretariat Direktorat Jenderal 169 orang, Direktorat Perbibitan 61 orang, Direktorat Pakan 55 orang, Direktorat Budidaya 58 orang, Direktorat Kesehatan Hewan 81 orang, Direktorat Kesmavet 52 orang
- 2) Jumlah pegawai pusat dan UPT: Pegawai pusat 477 orang, sedangkan pegawai UPT 1.789 orang
- 3) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV 211 orang, golongan III 1.396 orang, golongan II 608 orang dan golongan I 51 orang
- 4) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 20 orang, S-2 sebanyak 475 orang, S-1/D-4 sebanyak 495 orang, Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 244 orang, SLTA sebanyak 845 orang, SLTP sebanyak 74 orang, dan SD sebanyak 113 orang.

- 5) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 1.499 orang dan perempuan sebanyak 817 orang.

### 1.5 Dukungan Anggaran

APBN PKH tahun 2015 awalnya sebesar Rp.1,66 Triliun, adanya kebijakan refocusing melalui APBN Perubahan (APBN-P), Ditjen PKH mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 1,67 Triliun, sehingga total APBN menjadi Rp 3,13 Triliun. Berdasarkan kewenangan, bobot terbesar anggaran PKH terdapat pada kantor daerah sebesar Rp.1,12 Triliun (35,76%), sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp.2,68 Triliun (85,42%), dan berdasarkan jenis kegiatan utama bobot terbesar pada Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp.1,04 Triliun (33,14%).

Tabel 1 Anggaran Ditjen PKH Tahun 2015

(Rp Miliar)

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial	Total
1	Kantor Pusat	32.246	460.433	18.807	0	511.486
2	Kantor Daerah	110.823	736.394	273.969	0	1.121.187
3	Dekonsentrasi	0	283.427	0	0	283.426
4	Tugas Pembantuan Propinsi	0	952.397	1.554	19.500	973.451
5	Tugas Pembantuan Kabupaten	0	245.746	0,400	0	246.146
	Total	143.069	2.678.397	294.731	19.500	3.135.697

### 1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Ditjen PKH Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang instansi seperti dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi, dan sumber daya serta keunggulan lainnya yang dimiliki;
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini disampaikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program;



- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Ditjen PKH tahun 2015
- 4) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Ditjen PKH dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2015, Ditjen PKH telah mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2015-2019.

#### Visi

Visi Ditjen PKH dirumuskan sebagai berikut:

*“Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan kemandirian dan keamanan pangan asal ternak.”*

#### Misi

Menjabarkan dari Visi yang ditetapkan, Ditjen PKH akan mengemban Misi:

1. Merumuskan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Melaksanakan kebijakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi di atas, Ditjen PKH menentukan Tujuan yang hendak dicapai organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan populasi dan produksi ternak yang berdaya saing;
2. Memfasilitasi penyediaan bahan baku industri;
3. Meningkatkan status kesehatan hewan;
4. Menjamin produk hewan yang Aman, Sehat Utuh, dan Halal (ASUH);
5. Mengembangkan komoditas dan produk peternakan berdaya saing dan berorientasi ekspor; dan
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak;
7. Mengembangkan sistem bioindustri peternakan berkelanjutan; dan mencegah penularan penyakit hewan ke manusia.

## **Sasaran**

Sasaran pembangunan Ditjen PKH diuraikan sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan produksi pangan asal ternak: daging unggas, daging sapi-kerbau, telur, susu;
2. Tercapainya peningkatan kontribusi susu dalam negeri;
3. Berkembangnya produk industri peternakan prospektif (vaksin, semen beku, obat hewan, kulit, bulu, sarang burung walet, tulang/tanduk);
4. Berkembangnya produk biogas dan pupuk organik berbasis peternakan
5. Berkembangnya komoditas ternak berorientasi ekspor (kambing, domba, babi dan unggas).

## **Kebijakan dan Strategi**

### **1. Arah dan Kebijakan**

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional seperti yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 khususnya dalam hal pembangunan Kedaulatan Pangan Nasional.

Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2015-2019 adalah: (i) peningkatan produksi daging sapi dan kerbau; (ii) peningkatan pemenuhan pelayan dasar teknis minimal peternakan dan kesehatan hewan; (iii) pengembangan kawasan komoditas peternakan nasional; (iv) pengembangan komoditas strategis dan unggulan peternakan.

### **2. Strategi**

Strategi yang akan diterapkan dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah:

- 1) Pengembangan kawasan komoditas peternakan (komunal, skala usaha, peternakan-bioindustri berkelanjutan).
- 2) Penguatan infrastruktur peternakan dan keswan serta revitalisasi kelembagaan usaha/skala kepemilikan ternak menuju koperasi.
- 3) Penguatan tata niaga dan pemberian insentif peternakan.
- 4) Peningkatan status kesehatan hewan
- 5) Peningkatan daya saing produk peternakan

- 6) Perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan plasma nuftah lokal.
- 7) Penguatan regulasi mendorong kemandirian dan keamanan peternak.
- 8) Mendorong pengembangan sistem investasi melalui: *inti-plasma, sub contracting, franchising, general trading, distribution and agency, profit sharing, operational cooperation, joint ventures, outsourcing.*

## **Program dan Kegiatan**

### 1. Program

Program utama dari Ditjen PKH adalah “**Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**” . Program ini menjadi moto besar yang menjadi rujukan agar strategi Ditjen PKH yang telah dirumuskan dapat diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat aksi atau operasional.

*Outcome* yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah (i) peningkatan produksi daging, telur dan susu; (ii) Peningkatan kesejahteraan peternak; dan (iii) peningkatan daya saing peternakan. Outcome tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:

- (1) Kegiatan peningkatan produksi benih dan bibit Ternak  
Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi benih dan bibit ternak
- (2) Kegiatan peningkatan produksi ternak :  
Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi ternak
- (3) Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak  
Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak
- (4) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang).  
Sasaran: Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.
- (5) Kegiatan penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.  
Sasaran: Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
- (6) Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan.  
Sasaran: Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.

## 2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja setingkat Eselon II sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Kegiatan Ditjen PKH Tahun 2015-2019 adalah:

- (1) Peningkatan produksi benih dan bibit ternak
- (2) Peningkatan produksi ternak
- (3) Peningkatan produksi pakan ternak
- (4) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis
- (5) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan
- (6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen PKH

### 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam kurun waktu 2015-2019 arah kebijakan yang ditempuh oleh Ditjen PKH mengacu pada arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Mengacu pada rumusan di atas, maka Ditjen PKH pada 2015-2019 menetapkan arah kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan peternakan dan keswan tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah 1) meningkatnya produksi pangan asal ternak (daging sapi/kerbau, daging ternak lainnya, telur dan produksi susu), daya saing peternakan (status kesehatan hewan, sertifikat, ekspor obat hewan, ekspor semen beku, ekspor produk peternakan, skepor ternak hidup), dan kesejahteraan peternak berupa nilai tukar peternak. Detail target per tahun pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan produksi pangan asal ternak	a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	545,29	588,56	639,61	694,96	755,04
		b. Produksi daging ternak lainnya (000 ton)	3.438,01	3.678,67	3.796,88	3.969,57	4.167,51
		c. Produksi telur (000 ton)	3.131,89	3.393,36	3.565,86	3.655,43	3.770,04
		d. Produksi susu (000 ton)	799,97	850,77	910,57	980,88	1.063,56
2.	Peningkatan daya saing peternakan	a. Peningkatan status kesehatan hewan (terbebaskannya dari target yang telah ditetapkan) %	70	73	76	78	80
		b. Jumlah sertifikat (volume)	25.865	26.000	27.000	28.000	29.000
		c. Jumlah ekspor obat hewan (volume)					
		d. Jumlah ekspor semen beku (volume)					
		e. Jumlah ekspor produk peternakan (volume)					
		f. Jumlah ekspor ternak hidup (volume)					
3.	Peningkatan kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Peternakan (indeks)	106,94	107,23	107,53	107,82	108,12

### 2.3 Perjanjian Kinerja

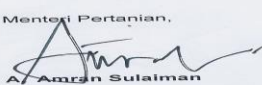
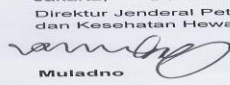
Ditjen PKH telah menyepakati perjanjian kinerja 2015 dengan delapan indikator yang ingin dicapai yaitu 1) produksi daging sapi/kerbau 545,3 ribu ton (dalam bentuk karkas), 2) produksi daging ternak lainnya 3.438,0 ribu ton (selain daging sapi/kerbau), 3) produksi telur 3.131,9 ribu ton, 4) produksi susu 799,9 ribu ton, 5) status kesehatan hewan 70%, 6) jumlah sertifikat 25.865 buah, 7) ekspor ternak hidup babi 33,8 ribu ton, dan 8) nilai tukar peternak 105,94. Pagu anggaran Ditjen PKH dalam upaya mencapai target tersebut sebesar Rp. 3,1 triliun. Selengkapnya pada Gambar 1.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pemenuhan Pangan Asal Ternak	1) Produksi daging sapi/kerbau	545.291 Ton
		2) Produksi daging ternak lainnya	3.438.009 Ton
		3) Produksi telur	3.131.889 Ton
		4) Produksi susu	799.971 Ton
2	Peningkatan Daya Saing Peternakan	1) Peningkatan Status Kesehatan Hewan	70 %
		2) Jumlah sertifikat	25.865 Buah
		3) Jumlah ekspor ternak hidup Babi	33.753 Ton
3	Peningkatan Kesejahteraan Peternak	NTP Peternakan	106,94

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Produksi Ternak	Rp 1.034.359.353.000,-
2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 844.337.377.000,-
3. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	Rp 400.432.801.000,-
4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	Rp 365.892.762.000,-
5. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	Rp 178.773.982.000,-
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 298.027.175.000,-
Jumlah	Rp 3.119.823.460.000,-

Menteri Pertanian,  Amran Sulaiman	Jakarta, Desember 2015 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  Muladno
---	---

**Gambar 1. Perjanjian kinerja Dirjen PKH tahun 2015.**

## 2.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKH Tahun 2014 oleh Inspektorat Jenderal

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas AKIP Ditjen PKH oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2014, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penetapan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PKH dengan Eselon II, Kepala UPT, dan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi pada tanggal 9 Februari 2016.
2. Menyampaikan hasil evaluasi kepada Eselon II lingkup Ditjen PKH melalui surat nomor 19014/PW.160/F1/02/2016, tanggal 19 Februari 2016
3. Menginstruksikan para pejabat Eselon II lingkup Ditjen PKH untuk menyusun rencana aksi, melakukan monitoring atas capaian PK dan melakukan analisa ketersediaan anggaran melalui Memo Dirjen tanggal 19 Februari 2016.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2015 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

#### 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis.

##### 3.2.1 Capaian Sasaran Strategis PK Tahun 2015

Capaian sasaran strategis Ditjen PKH pada tahun 2015 termasuk kategori berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis delapan indikator yang rata-rata lebih dari 80%, dengan kisaran 41,8% – 101,0 %. Selengkapnya pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target dan Realisasi		
			2015	Realisasi *	Persen
1.	Peningkatan produksi pangan asal ternak	a. Produksi daging sapi/kerbau (000 ton) **)	545,3	555,6	101,0
		b. Produksi daging ternak lainnya (000 ton)	3.438,0	2.500	72,7
		c. Produksi telur (000 ton)	3.131,9	1.764,2	56,3
		d. Produksi susu (000 ton)	799,9	805,0	100,7
2.	Peningkatan daya saing peternakan	a. Peningkatan status kesehatan hewan (terbebaskannya dari target yang telah ditetapkan) %	70	73,1	104,4
		b. Jumlah sertifikat (volume)	25.865	27.380	105,85
		c. Ekspor ternak hidup Babi (ton)	33.758	28.146	83,38
3.	Peningkatan kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Peternakan (indeks)	106,9	107,7	100,7

Keterangan :

Sumber : Data statistik peternakan 2015, Ditjen PKH

\*= angka sementara

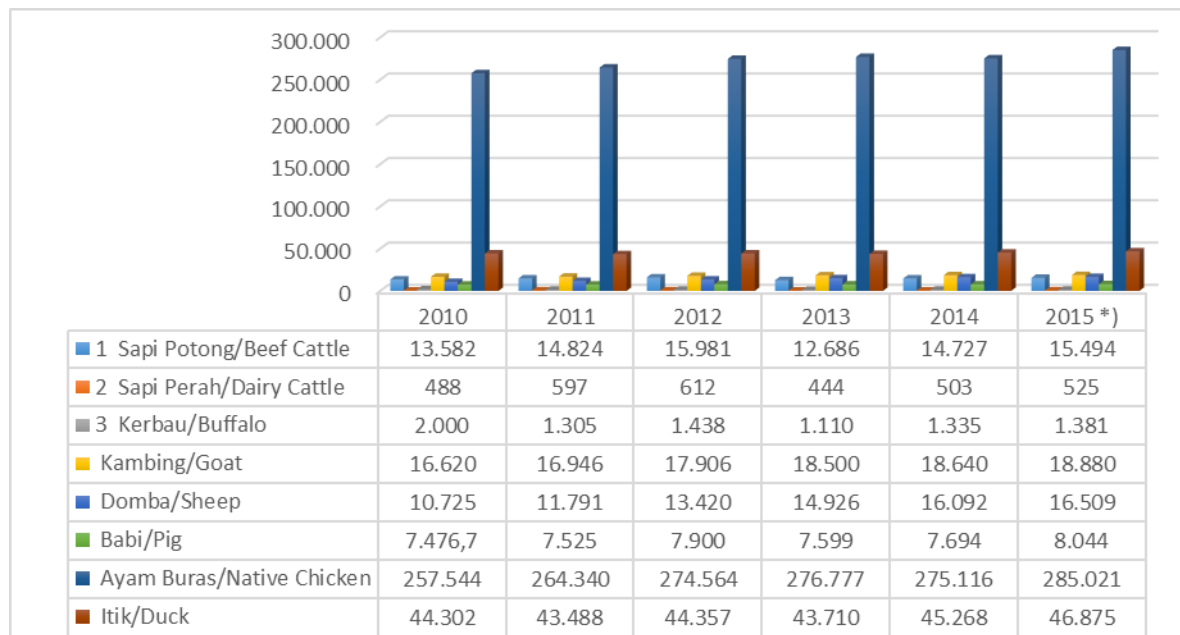
\*\*) = produksi daging sapi/kerbau dalam bentuk karkas, setara dengan 444,4 ribu ton *meat yield* (daging)



### 3.2.3. Capaian Populasi Ternak 2015

Dalam rentang waktu 2014-2015 (angka sementara) pertumbuhan populasi ternak besar rata-rata mengalami kenaikan sapi potong 5,21%, sapi perah 4,51%, dan kerbau 3,46%, begitu pula pertumbuhan populasi ternak kecil juga meningkat yaitu kambing 1,29%, domba 2,59%, dan babi 4,54%. Pertumbuhan populasi ternak unggas dan aneka ternak rata-rata meningkat, yaitu : ayam buras 3,60%, dan itik 3,55%.

Realisasi populasi ternak besar tahun 2015 dibandingkan dengan sasaran dalam Renstra 2015-2019 mencapai lebih dari 100%, yaitu sapi potong 116,98%, sapi perah 112,90%, dan kerbau 123,19%, sedangkan realisasi populasi ternak kecil rata-rata mencapai lebih dari 90% yaitu kambing 94,67%, domba 97,05%, dan babi 100,93%. Sedangkan realisasi populasi ternak unggas seperti ayam buras dan itik masing-masing mencapai 102,79% dan 101,65%. Selengkapnya pada Gambar 2.



Sumber : Data statistik peternakan tahun 2015, Ditjen PKH

\*) = angka sementara

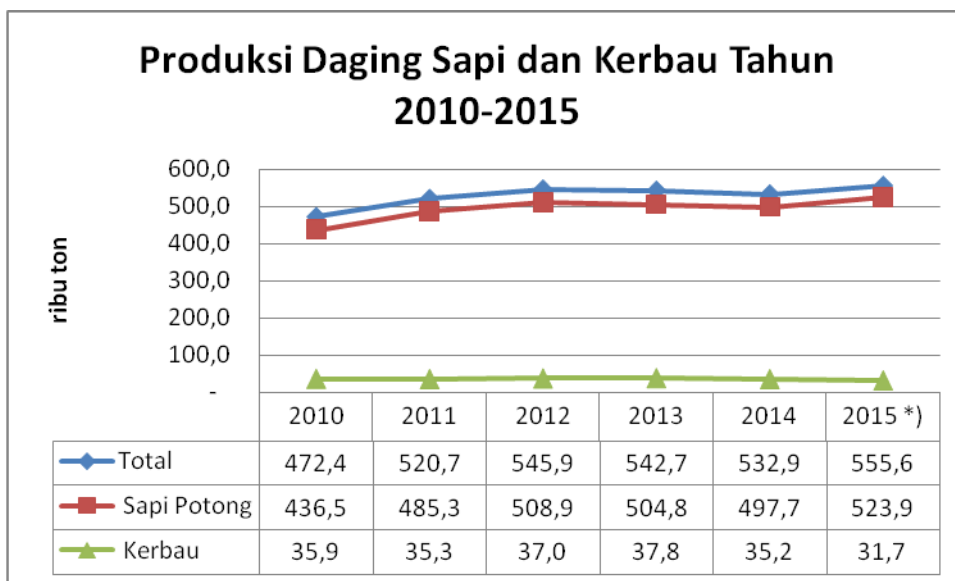
Gambar 2. Grafik populasi ternak tahun 2010-2015

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### 3.3.1 Produksi Daging Sapi/Kerbau

Produksi daging sapi/kerbau secara nasional tahun 2015 tercapai 555,6 ribu ton, meningkat 4,2% dari tahun 2014 sebesar 532,9 ribu ton. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra tahun 2015-2019 sebesar 545,3 ribu ton, capaian produksi daging sapi/kerbau tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan (101,9%), sehingga dapat dinilai sangat berhasil.

Selama kurun waktu 2010-2015, capaian produksi daging menunjukkan trend positif, dengan peningkatan rata-rata 3,39% per tahun, seperti yang disajikan pada Gambar 3



Gambar 3. Trend produksi daging sapi dan kerbau tahun 2010-2015

Capaian tersebut, disebabkan adanya dukungan program dan kegiatan dalam periode 2010-2015 yang cukup berhasil antara lain melalui:

- 1) Insentif penyelamatan sapi betina bunting 5.823 kelompok. Pada tahun 2015 kegiatan ini telah memberikan dampak peningkatan populasi sebanyak 7.985 ekor (jantan 1.940 ekor dan betina 3.009 ekor).
- 2) Peningkatan populasi ternak di UPT perbibitan 10.390 ekor.
- 3) Pengembangan integrasi tanaman-ruminansia di 1.134 kelompok, dengan jumlah ternak 17.197 ekor dan luas lahan yang ditanami HPT 22.280 Ha
- 4) Penguatan pakan sapi penggemukan yang baru dilaksanakan tahun 2015 pada 321 kelompok dengan jumlah pakan konsentrat 10.101 Ton. Hasil

evaluasi kegiatan, telah mampu meningkatkan bobot badan rata-rata untuk Sapi Bali 0,66 kg/ekor/hari, Sapi PO 0,79 kg/ekor/hari dan Sapi Persilangan 1,17 kg/ekor/hari.

- 5) Pengembangan hijauan pakan seluas 6.201 Ha atau 62.010.000 Stek, melalui kegiatan : 1) pengembangan hijauan pakan di 9 UPT Pusat, 89 lokasi UPTD dan 127 kelompok; 2) penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas dan 3) pengembangan padang penggembalaan
- 6) Peningkatan kapasitas petugas IB, PKB dan ATR, yang dilaksanakan secara kontiniu, yang diikuti oleh 4.225 peserta atau telah dilatih 92.8% dari target 4.552 orang petugas. Pelatihan ini diikuti oleh 32 provinsi, yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu BBIB Singosari, BIB Lembang, BPTU-HPT Padang Mangatas dan BPTU HPT Sembawa. Khusus tahun 2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga bekerjasama dengan Badan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas petugas IB, PKB dan ATR yaitu BBPKH Cinagara dan BBPP Batu.
- 7) Pengembangan usaha budidaya ternak sapi potong dan kerbau, pada 4.286 kelompok dari target 4.532 kelompok dengan jumlah yang terealisasi adalah 107.744 ekor di 32 Propinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak sapi; b) pengembangan budidaya ternak kerbau; c) pengembangan budidaya ternak sapi potong dan kerbau melalui Sarjana Membangun Desa (SMD); d) pengembangan budidaya ternak sapi potong dan kerbau melalui LM3; dan e) pengembangan sapi potong pada kegiatan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik).
- 8) Produksi semen beku, yang dilaksanakan oleh BBIB Singosari dan BIB Lembang. Jumlah semen beku yang telah diproduksi 24,72 juta dosis, dengan jumlah distribusi 18,44 juta dosis.
- 9) Produksi embrio oleh Balai Embrio Ternak (BET) sebanyak 5.940 embrio.
- 10) Penyebaran pejantan InKA (Intensifikasi Kawin Alam) sapi potong dan kerbau, yang disebar sebanyak 12.512 ekor di 18 provinsi dalam kurun waktu 2010-2015. Kegiatan penyediaan pejantan InKa atau pemacek dilaksanakan pada wilayah yang pemeliharaan ternaknya belum intensif dengan tujuan penyebaran pejantan unggul untuk kawin alam dan

perbaikan rasio antara jantan dan betina sejalan dengan perbaikan mutu genetik ternak.

- 11) Pengembangan indukan sapi, dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 2.470 ekor di Papua dan Papua Barat. Pengembangan indukan sapi di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi potong di wilayah Timur Indonesia, dengan indukan sapi potong lokal yang dikembangkan adalah sapi Bali.
- 12) Optimalisasi IB. Untuk mendukung kegiatan optimalisasi IB dilaksanakan melalui kegiatan reguler dan Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB). Kegiatan reguler optimalisasi IB meliputi sinkronisasi berahi, distribusi semen beku dan pengadaan N2 Cair. Sinkronisasi berahi realisasi tahun 2010-2015 dilaksanakan di 33 Propinsi dengan realisasi 184.664 dosis dari target 216.788 dosis. Distribusi semen beku realisasi tahun 2010-2015 sebesar 10.411.365 dosis dari target 14.728.210 dosis. Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan GBIB dengan target akseptor sebanyak 691.000 ekor dan realisasi 410.559 ekor. Jumlah total kelahiran IB tahun 2010-2015 sebanyak 8.736.093 ekor.
- 13) Penguatan kelembagaan Inseminasi Buatan (IB), dilaksanakan melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan pelayanan IB pada SPIB I, SPIB II, kelempagaan pos IB pada wilayah IB introduksi dan wilayah IB pengembangan sebesar 5.064 unit dari target 5.377 unit di 31 propinsi.
- 14) Penanggulangan gangguan reproduksi pada 631 ribu ekor sapi/kerbau di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut 360 ribu ekor (57,07%) terdeteksi mengalami gangguan reproduksi untuk ditangani lebih lanjut.
- 15) Penguatan kelembagaan kesehatan hewan melalui pembangunan 373 unit puskesmas untuk melengkapi 889 unit puskesmas yang sudah ada, sehingga total keseluruhan puskesmas saat ini 1.262 unit puskesmas yang tersebar di 421 kab/kota di seluruh provinsi.
- 16) Fasilitasi RPH di wilayah sentra produksi sapi dan kerbau melalui pembangunan 157 unit RPH, fasilitasi peralatan di 136 unit RPH dan revitalisasi 157 unit RPH. Jumlah seluruh RPH sampai saat ini 157 unit, tersebar di 27 provinsi untuk menyediakan daging yang ASUH.
- 17) Penjaminan daging sapi/kerbau yang ASUH di 149 unit usaha (RPH – R, UPD, Pengimpor, Distributor, Retail, Kios daging/hasil olahannya) melalui penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner

- 18) Fasilitasi kios daging 97 unit, untuk menjamin kualitas daging yang ASUH sampai ke konsumen. Jumlah kios daging sampai saat ini 97 unit di 30 provinsi

### **3.3.2 Produksi daging ternak lainnya**

Produksi daging ternak lainnya terdiri dari produksi daging kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Produksi daging ternak lainnya tahun 2015 mencapai 2,50 juta ton, meningkat 4,79% dibanding tahun 2014 sebesar 2,38 juta ton. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2015 sebesar 3,44 juta ton, maka kinerja tahun 2015 sebesar 72,7% (cukup berhasil).

Kontribusi produksi daging ternak lainnya terbesar bersumber dari ayam ras pedaging (65%). Sedangkan capaian produksi daging ayam ras pedaging tahun 2015 sebesar 64,41%, hal ini yang berpengaruh besar terhadap capaian produksi daging ternak lainnya.

Kondisi ini, kemungkinan disebabkan oleh perbaikan target produksi daging ayam ras pada tahun 2015 dengan memperhatikan aspek kebutuhan DOC. Hal ini mengingat pada tahun-tahun sebelumnya produksi daging ayam ras yang dilaporkan tidak menggambarkan jumlah DOC yang diproduksi, serta kebutuhan pakan. Dengan perbaikan target produksi daging ayam ras pedaging tersebut, diharapkan ada sinergi dalam penghitungan supply demand daging ayam ras nasional, termasuk penghitungan kebutuhan pakan. Namun, di dalam penghitungan realisasi produksi daging ayam ras oleh propinsi belum sepenuhnya menggambarkan jumlah produksi DOCnya. Hal ini mungkin disebabkan, data/informasi produksi dan distribusi DOC oleh Breeder ke wilayah lain tidak/belum dilaporkan dengan baik kepada Dinas kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan di propinsi.

Peningkatan produksi tahun 2015 didukung oleh pertumbuhan produksi daging ternak kambing 1,23%, babi 5,56%, ayam buras 5,48%, ayam ras pedaging 5,35%, dan itik 4,82%. Namun untuk komoditas domba dan ayam ras petelur dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan masing-masing 5,96% dan 1,65%, seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi daging ternak lainnya tahun 2014-2015

(000 ton)

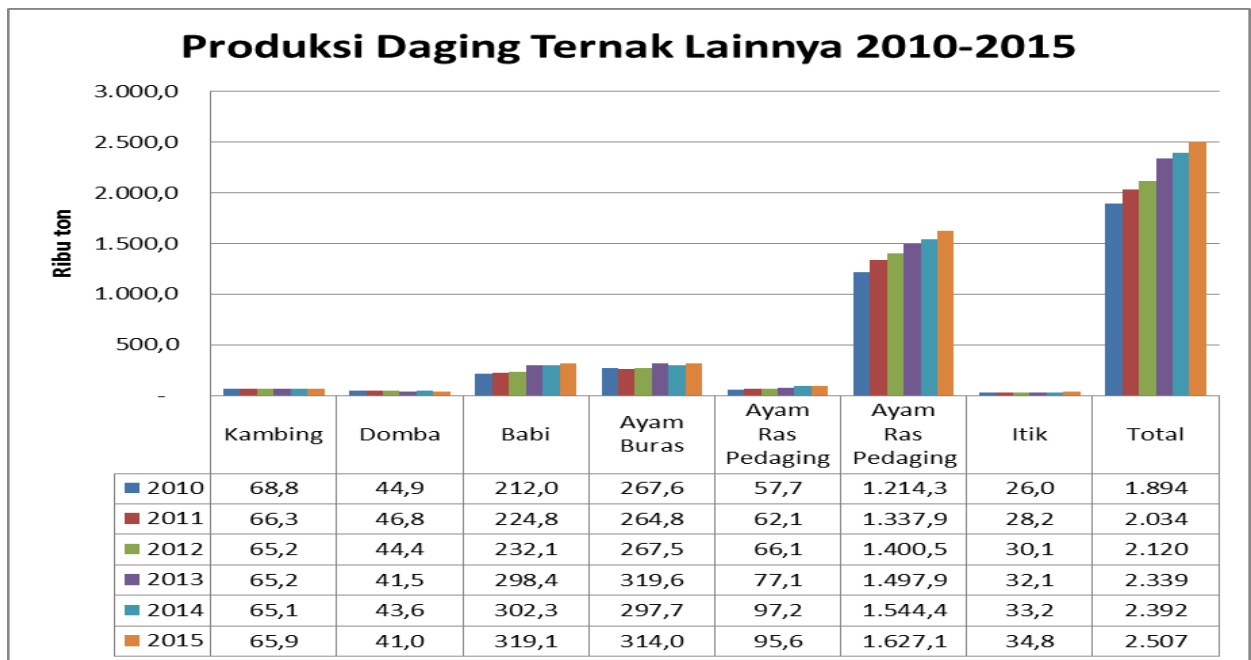
No	Komoditas	Produksi			Capaian Produksi Tahun 2015 terhadap Target	Pertumbuhan tahun 2015 terhadap 2014
		2014	2015*			
			Target	Realisasi		
1	Kambing	65,10	66,19	65,90	99,56	1,23
2	Domba	43,60	48,32	41,00	84,85	(5,96)
3	Babi	302,30	334,89	319,10	95,29	5,56
4	Ayam Buras	297,70	326,94	314,00	96,04	5,48
5	Ayam Ras Petelur	97,20	98,77	95,60	96,79	(1,65)
6	Ayam Ras Pedaging	1.544,40	2.526,01	1.627,10	64,41	5,35
7	Itik	33,20	36,89	34,80	94,33	4,82
<b>Total</b>		<b>2.383,50</b>	<b>3.438,01</b>	<b>2.497,50</b>	<b>72,64</b>	<b>4,78</b>

Keterangan :

Sumber data Statistik Ditjen PKH 2015

\*= angka sementara

Selama kurun waktu 2010-2015, capaian produksi daging ternak lainnya menunjukkan trend peningkatan, rata-rata 5,8% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Trend Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2010-2015

Kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja produksi daging ternak lainnya 2010-2015 adalah:

- 1) Pengembangan usaha budidaya ternak kambing dan domba, pada 1.210 kelompok dari target 1.247 kelompok dengan jumlah yang terealisasi adalah 73.085 ekor di 18 Propinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak kambing; b) pengembangan budidaya ternak domba; c)

- pengembangan budidaya ternak kambing dan domba melalui SMD; dan d) pengembangan budidaya ternak kambing dan domba melalui LM3.
- 2) Pengembangan usaha budidaya ayam lokal, selama kurun waktu 2010-2015 dilaksanakan pada 911 kelompok dari target 923 kelompok di 33 provinsi sebanyak 1.419.417 ekor, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya unggas lokal (ayam) di pedesaan (VPF); b) pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal (KAUL) (ayam); c) pengembangan unggas (ayam) di pemukiman; d) pengembangan zona perunggasan (ayam); e) pengembangan budidaya ayam lokal; f) pengembangan budidaya unggas lokal melalui SMD; dan g) pengembangan budidaya ayam lokal melalui LM3. Tujuan pengembangan usaha budidaya ayam lokal adalah untuk pembiakan dalam rangka *replacement* atau peremajaan ternak mendorong peningkatan produksi ternak.
  - 3) Pengembangan usaha budidaya ternak babi, pada 287 kelompok dari target 292 kelompok dalam kurun waktu 2010-2015 di 10 provinsi sebanyak 10.329 ekor, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya babi; b) pengembangan budidaya babi ramah lingkungan; dan c) pengembangan budidaya babi melalui LM3. (oke)
  - 4) Pengembangan pakan olahan melalui kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas, Lumbung Pakan Unggas dan Revitalisasi UPP/LP/PPSK pada 263 kelompok.
  - 5) Peningkatan kualitas bibit unggul kambing dan domba, ayam lokal, itik lokal, dan babi, masing-masing 85 klp (3.829 ekor); 59 klp (40.634 ekor); 55 klp (43.282 ekor); 19 klp (792 ekor).
  - 6) Pembebasan penyakit Hog Cholera di 18 kab/kota di provinsi Sumatera Barat serta Pengendalian dan penanggulangan di 8 propinsi sentra babi sebanyak 290 ribu ekor pada tahun 2015.
  - 7) Pembebasan penyakit Avian Influenza (AI) secara kompartementalisasi pada 49 farm di 7 provinsi, dan proses pembebasan di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yang diindikasikan dengan tidak adanya kasus melalui surveilan.
  - 8) Penjaminan daging unggas yang ASUH di 6 unit usaha (RPU, UPD, Distributor, Retail, Kios daging/hasil olahannya) melalui penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner
  - 9) Fasilitasi RPB melalui pembangunan dan fasilitasi peralatan 5 unit RPB di provinsi Sulawesi Utara (menado), Kalimantan Barat (Singkawang), Papua (Timika), Sumatera Utara (Binjai) dan Kepulauan Riau.

### 3.3.3 Produksi Telur

Produksi telur secara nasional tahun 2015 sebesar 1,76 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,70 juta ton, maka produksinya meningkat 3,65%. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2015 sebesar 2,98 juta ton, maka capaian kinerjanya sebesar 56,33% (kurang berhasil).

Pada tahun 2015, Ditjen PKH memperbaiki target produksi telur dengan memperhatikan aspek kebutuhan DOC. Hal ini mengingat pada tahun-tahun sebelumnya produksi telur yang dilaporkan tidak menggambarkan jumlah DOC yang diproduksi, serta kebutuhan pakan. Dengan perbaikan target produksi telur tersebut, diharapkan ada sinergi dalam penghitungan supply demand telur ayam ras nasional, termasuk penghitungan kebutuhan jagung (yang merupakan 40-60% komponen pakan). Namun, di dalam penghitungan realisasi produksi telur ayam ras oleh propinsi belum sepenuhnya menggambarkan jumlah produksi DOCnya. Hal ini mungkin disebabkan, data/informasi produksi dan distribusi DOC oleh Breeder ke wilayah lain tidak/belum dilaporkan dengan baik kepada Dinas kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan di propinsi.

Peningkatan produksi tahun 2015 didukung oleh pertumbuhan produksi telur ayam buras 3,90%, ayam ras petelur 3,65% dan itik 3,48%. seperti yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Produksi telur tahun 2014-2015

(000 ton)

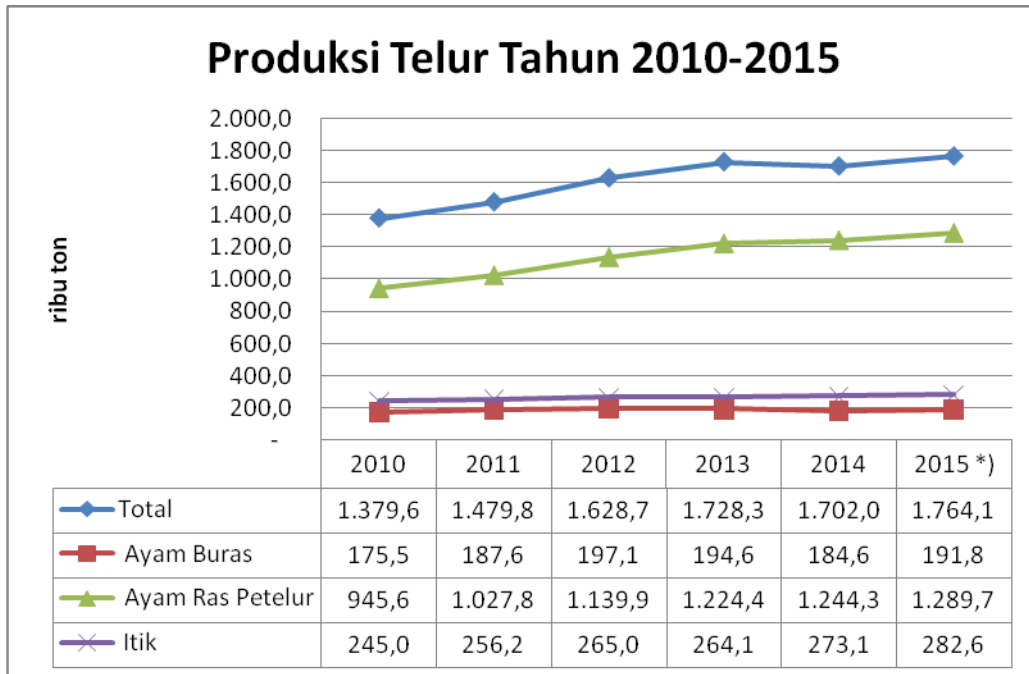
No	Komoditas	Produksi			Capaian Produksi Tahun 2015 terhadap Target	Pertumbuhan tahun 2015 terhadap 2014
		2014	2015			
			Target	Realisasi		
1	Ayam Buras	184,6	201,36	191,8	95,25	3,90
2	Ayam Ras Petelur	1.244,31	2.645,74	1.289,8	51,64	3,65
3	Itik	273,1	284,79	282,6	99,23	3,48
<b>Total</b>		<b>1.702,01</b>	<b>3.131,89</b>	<b>1.764,2</b>	<b>56,33</b>	<b>3,65</b>

**Keterangan :**

1. Sumber data Statistik Ditjen PKH 2014
2. \*= angka sementara

Selama kurun waktu 2010-2015, capaian produksi telur menunjukkan trend peningkatan, rata-rata 5,7% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.





Gambar 5. Trend Produksi Telur Tahun 2010-2015

Kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja produksi telur 2010-2015 adalah :

- 1) Penguatan pembibitan unggas di 7 kabupaten terpilih di 6 provinsi.
- 2) Pengembangan usaha budidaya itik, dilaksanakan pada 365 kelompok di 32 provinsi sebanyak 671.720 ekor dalam kurun waktu 2010-2015, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya unggas lokal (itik) di pedesaan (VPF); b) pengembangan unggas (itik) di pemukiman; c) pengembangan zona perunggasan (itik); d) pengembangan kawasan agribisnis unggas lokal (KAUL) (itik); e) pengembangan budidaya itik; f) pengembangan budidaya itik melalui LM3.
- 3) Pengembangan usaha budidaya puyuh, dilaksanakan pada 55 kelompok dari target 56 kelompok di 8 provinsi sebanyak 225.039 ekor.
- 4) Fasilitasi dan Revitalisasi UPP/LP/PPSK pada 29 kelompok
- 5) Pengujian Pullorum pada Parent Stock dengan jumlah hasil uji 101.888.
- 6) Pengujian salmonella pada produk telur konsumsi dengan jumlah sampel 1.416 (2013-2014) di seluruh Indonesia, yang hasilnya 99.85.% telah memenuhi SNI

### 3.3.4 Produksi Susu

Produksi susu nasional tahun 2015 sebesar 805,40 ribu ton, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 800,80 ribu ton, maka produksinya meningkat 0,57%. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2015 sebesar 799,97 ribu ton, maka capaian kinerjanya sebesar 100,68% (sangat berhasil).

Tabel 6. Capaian produksi susu tahun 2014-2015

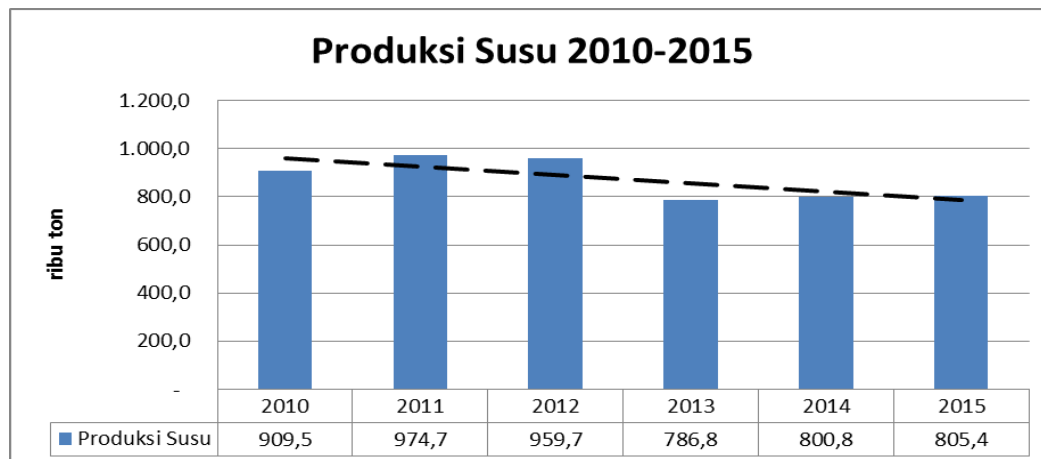
Komoditas	Produksi			Capaian Produksi Tahun 2015 terhadap Target	Pertumbuhan tahun 2015 terhadap 2014
	2014	2015*			
		Target	Realisasi		
Produksi Susu	800,80	799,97	805,40	100,68	0,57

(000 ton)

Keterangan :

1. Sumber data Statistik Ditjen PKH 2014
2. \*= angka sementara

Selama kurun waktu 2010-2015, capaian produksi susu menunjukkan trend menurun, rata-rata 2% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Trend Produksi Susu Tahun 2010-2015

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pencapaian produksi susu yang dilaksanakan tahun 2010-2015 adalah :

- 1) Pengembangan usaha budidaya ternak sapi perah, dilaksanakan pada 455 kelompok dari target 462 kelompok dengan jumlah yang terealisasi adalah 9.022 ekor di 19 provinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak sapi perah; b) pengembangan budidaya ternak sapi perah melalui SMD; dan 3) pengembangan budidaya ternak sapi perah melalui LM3.
- 2) Pengembangan usaha budidaya ternak kambing perah, dilaksanakan pada 316 kelompok dari target 314 kelompok dengan jumlah yang terealisasi

adalah 12.811 ekor di 15 provinsi, melalui kegiatan: a) pengembangan budidaya ternak kambing perah; dan b) pengembangan budidaya ternak sapi perah melalui LM3.

- 3) Pengembangan usaha budidaya kerbau perah baru dilaksanakan di 5 kelompok dari target 10 kelompok dengan realisasi 78 ekor di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
- 4) Fasilitasi Penerapan *Good Farming Practices* baru dilaksanakan pada tahun 2015 di 9 kelompok (11 provinsi dari target 14 provinsi), dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, rehabilitasi kandang, pengadaan milk can, pakan konsentrat, rekording ternak, workshop, apresiasi dan sekolah lapang. Tujuan dari fasilitasi penerapan GFP yaitu mendorong penerapan GFP yang baik ditingkat peternak, dengan fasilitasi sarana prasarana maupun pembinaan cara budidaya sapi perah yang baik.
- 5) Bantuan Penguatan Pakan Sapi Perah yang dilaksanakan selama tahun 2013 - 2015 di 654 kelompok atau setara dengan 14.715 Ton pakan konsentrat sesuai SNI. Hasil evaluasi terakhir yang dilaksanakan tahun 2015, kegiatan ini telah dapat meningkatkan produksi susu rata-rata 2,12 liter/ekor, kenaikan kualitas susu (TS) 0,50% dan kenaikan pendapatan peternak Rp. 21,717 per orang/hari.
- 6) Selain Bantuan Penguatan Pakan Sapi Perah, kegiatan lain yang mendukung produksi susu adalah pengembangan hijauan pakan di UPT Pusat 181 Ha atau 1.810.000 Stek dan penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas sebanyak 122 Ha atau 1.220.000 stek.
- 7) Pembibitan sapi perah 55 kelompok dengan jumlah ternak 769 ekor.
- 8) Peningkatan kualitas bibit unggul sapi perah melalui kegiatan uji zuriat di 4 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur) telah menghasilkan pejantan unggul sebanyak 4 ekor *proven bull* ditahun 2011 dan 3 ekor ditahun 2015. Kegiatan tersebut dilakukan untuk replacement proven bull sapi perah dan peningkatan mutu genetik.
- 9) Penjaminan keamanan produk susu melalui penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner di 27 unit usaha.
- 10) Pengujian cemaran mikroba (2013-2014) pada susu sebanyak 2.030 sampel yang hasilnya 97.01 % telah memenuhi SNI, dan residu antibiotik (2013-2014) pada susu sebanyak 597 sampel, yang hasilnya 83 % telah memenuhi SNI

### 3.3.5 Peningkatan status kesehatan hewan

Peningkatan status kesehatan hewan yang ditargetkan 360 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota (70%) terealisasi 394 kabupaten/kota (76,65%) yang menggambarkan dari keberhasilan pengendalian dan penanggulangan serta pembebasan PHMS prioritas Brucellosis, Rabies, Avian Influenza (AI) dan Hog Cholera. Sedangkan untuk Anthrax dilakukan pengendalian penyakit. Selengkapnya disajikan pada Tabel 7

Tabel 7 Pembebasan PHMS Prioritas Tahun 2010-2015

No	Penyakit	Jumlah Kabupaten/Kota					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Brucellosis	124	169	169	169	169	177
2	Rabies	163	163	163	170	173	190
3	Avian Influenza	-	-	-	-	-	9
4	Hog Cholera	-	-	-	-	18	18
Total		287	332	332	339	360	394
%		55.83	64.59	64.59	65.95	70.00	76,65

Pada tahun 2015 target pembebasan penyakit Rabies 2 wilayah (Provinsi Kepulauan Riau (12 kab/kota) dan pulau Mentawai, provinsi Sumbar) dan Brucellosis sebanyak 2 wilayah ( pulau Madura (4 kabupaten) dan Pulau Sumba (4 kabupaten)). Sampai akhir Desember 2015 telah dibebaskan 6 wilayah (150%) untuk penyakit rabies dan Brucellosis. Wilayah bebas Rabies tersebut adalah Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Meranti (Prov Riau), Pulau Enggano (Prov. Bengkulu), dan Pulau Mentawai (Prov. Sumatera Barat), sedangkan wilayah bebas penyakit Brucellosis adalah Pulau Sumba (Prov. NTT) dan Pulau Madura (Prov. Jatim).

Untuk penyakit Anthrax tidak dapat dilakukan pembebasan penyakit , akan tetapi dilakukan pengendalian, karena kuman Anthrax di tanah akan berubah menjadi bentuk spora. Spora Anthrax ini dapat hidup sampai 40 tahun lebih dan dapat menjadi sumber penularan penyakit baik kepada ternak dan manusia. Daerah endemik Anthrax pada 10 tahun terakhir yaitu Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, DIY, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jatim dan Jambi.

Peningkatan status kesehatan hewan selain dilakukan melalui pembebasan wilayah, juga dilakukan secara kompartementalisasi utamanya pada penyakit Avian Influenza. Sampai dengan tahun 2015 sudah berhasil dibebaskan 49 farm,

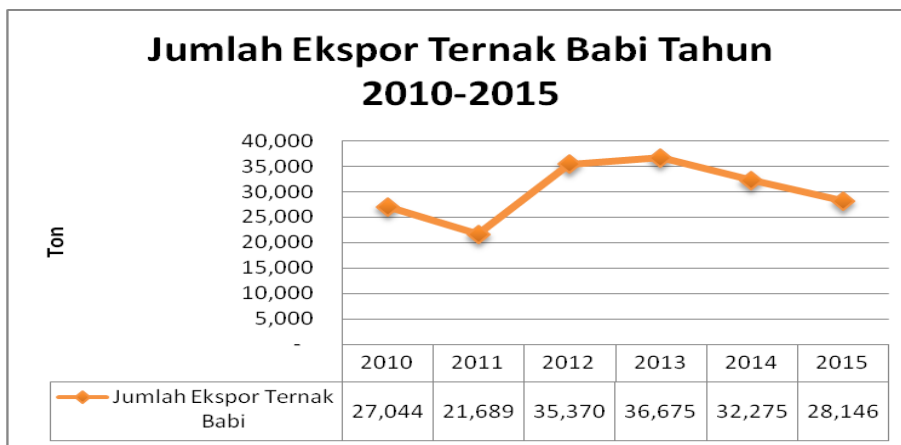
### 3.3.6 Jumlah sertifikat

Peningkatan daya saing antara lain dapat diukur dari jumlah sertifikat bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diterbitkan. Pada tahun 2015 telah diterbitkan 27.380 sertifikat yang terdiri dari sertifikat bidang pakan, bidang kesehatan hewan, bidang perbibitan, dan bidang kesmavet. Jika dibandingkan dengan targetnya sebanyak 25.865, jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2015 telah melebihi target 105,85% (sangat berhasil). Jumlah sertifikat bidang peternakan dan kesehatan hewan tahun 2010-2015 selengkapnya disampaikan pada Lampiran 4.

### 3.3.7 Ekspor Ternak Hidup Babi

Jumlah ekspor ternak hidup babi tahun 2015 sebesar 28.146 ton. Ekspor tahun lalu sebesar 32.275 ton, sehingga meningkat/menurun 13%. Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 33.758 ton, jumlah ekspor ternak hidup babi baru mencapai 83,38% (berhasil).

Selama kurun waktu 2010-2015, jumlah ekspor ternak babi menunjukkan trend meningkat rata-rata 4,5% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Trend Jumlah Ekspor Ternak Babi Tahun 2010-2015

### 3.3.8 Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)

Nilai tukar petani peternak merupakan indikator proxy kesejahteraan peternak. NTPT merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima peternak (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). NTPT tahun 2015 sebesar 107,69, meningkat 0,97% dari tahun 2014 sebesar 106,65. Nilai NTPT > 100 berarti peternak mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari

pengeluarannya. Peningkatan NTPT disebabkan oleh peningkatan IT lebih tinggi dibandingkan peningkatan IB.

Komponen IB terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Pengeluaran terbesar pada komponen konsumsi adalah untuk bahan makanan, sementara pengeluaran terbesar untuk biaya produksi adalah sewa lahan, pajak & lainnya, obat-obatan & pupuk dan pembelian bibit.

Tabel 8 Perbandingan NTPT Tahun 2014-2015

No	Kelompok Dan Sub Kelompok	2014	2015	Laju %
	<i>Groups And Sub Group</i>			
1	<b>Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT)/Indices Of Price Received By Farmers (IT)</b>	<b>116,53</b>	123,96	5,99
	Ternak Besar/ <i>Large Livestock</i>	118,13	125,83	6,12
	Ternak Kecil/ <i>Small Livestock</i>	114,61	121,88	5,97
	Unggas/ <i>Poultry</i>	114,38	120,92	5,41
	Hasil Ternak/ <i>The production of Livestock</i>	112,36	119,23	5,76
2	<b>Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)/Indices Of Consumer Prices Paid By Farmers (IB)</b>	<b>109,26</b>	115,10	5,07
	Indeks Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household consumption indices</i>	114,03	122,18	6,67
	Bahan Makanan/ <i>Food</i>	119,17	129,36	7,88
	Makanan Jadi/ <i>Prepared Food</i>	110,15	117,38	6,16
	Perumahan/ <i>Housing</i>	110,24	117,78	6,40
	Sandang/ <i>Clothing</i>	110,33	117,25	5,91
	Kesehatan/ <i>Health</i>	107,92	113,79	5,16
	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga/ <i>Education, Recreation &amp; Sport</i>	108,05	111,68	3,25
	Transportasi & Komunikasi/ <i>Transportation &amp; Communication</i>	115,03	122,28	5,93
	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/ <i>Cost of Production and Capital Formation Indices</i>	104,98	108,78	3,49
	Bibit/ <i>Seed</i>	105,94	109,25	3,03
	Obat-obatan & Pupuk/ <i>Drugs &amp; Fertilizer</i>	102,44	106,22	3,56
	Transportasi & Komunikasi/ <i>Transportation &amp; Communication</i>	104,04	107,23	2,97
	Sewa Lahan, Pajak & Lainnya/ <i>Hire of Land, Taxes &amp; Others</i>	118,03	126,78	6,90
	Penambahan Barang Modal/ <i>Capital Formation</i>	104,99	107,85	2,65
Upah Buruh Tani/ <i>Wage of farmworker</i>	106,47	109,87	3,09	
3	<b>Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)/Animal Husbandry Farmers Terms Of Trade (AFTT)</b>	<b>106,65</b>	107,69	0,97

Sumber: BPS (2015)

### 3.4 Kinerja Lainnya

- Kapal Ternak

Pemanfaatan Kapal Ternak KM Camara I untuk mengirim / mengangkut ternak sapi dari daerah sentra produksi seperti NTT, NTB dan Jatim ke daerah konsumsi di Jabodetabek. Adapun rute perjalanan kapal di mulai dari Kupang, Bima, Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang), berakhir di Cirebon dan Kembali ke Kupang. Kapasitas pengangkutan ternak sapi maksimal 500 ekor dan minimal 300 ekor dengan bobot minimal 275 kg/ekor. Manfaat kapal ini selain memperlancar pengangkutan ternak juga dapat membuat harga sapi lokal menjadi lebih kompetitif dengan sapi import karena biaya transportasi lebih murah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap import. Lebih lanjut dengan pemanfaatan kapal ternak dapat meminimalkan biaya distribusi sehingga para peternak dapat menjual ternaknya dengan keuntungan yang maksimal dan dapat menekan harga daging sapi ditingkat konsumen.

- KfW

*Prevention And Control Of Influenza In The Veterinary Sector Project.* Alokasi dana untuk proyek ini besarnya 3,300,000 EURO dengan proporsi 3,000,000 Euro merupakan bantuan hibah KfW Jerman dan 300,000 Euro merupakan dana pendamping dari Pemerintah Republik Indonesia. Bantuan ini merupakan hibah langsung, tetapi dana hibah dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan siklus penganggaran APBN. Bantuan hibah ini digunakan untuk pembangunan Laboratorium BSL-3 di BBPMSOH Gunung Sindur – Bogor dalam rangka meningkatkan kemampuan pengujian vaksin untuk penanggulangan penyakit Avian Influenza di Indonesia;

- RPH Rantai Dingin

Upaya peningkatan jaminan produk ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) utamanya daging sapi dilakukan melalui perbaikan sarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), penetapan Nomor Kontrol Veteriner dan pengawasan kelayakan produk ternak. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang telah mampu memproduksi daging segar dingin/beku sapi lokal adalah RPH-R Tembesi, Kab. Gianyar, Bali; RPH-R Potoe Tanoe Kabupaten Sumbawa Barat, NTB ; RPH-R Asakota Kota Bima, NTB; RPH-R Eka Putra Jaya, Kab. Bojonegoro, Jatim; dan RPH-R Segarau Bahari, Kab. Sumbawa, NTT. Kelima RPH-R tersebut telah mampu mengirim

daging ke JABODETABEK kurang lebih 112 ton/bulan. Ke depan diharapkan volume pengiriman daging dingin/beku ke Jabodetabek semakin meningkat dan mampu bersaing dengan daging beku impor.

- Ekspor DOC ke Myanmar

Kegiatan ekspor DOC ke Myanmar dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Grand Parent Stock (GPS) Hatchery Wanawasa, Purwakarta, Jawa Barat ke PT. Japfa Comfeed Myanmar Pte. Ltd yang beralamat di No. 264. 6th Street Yangon Myanmar. Jenis DOC yang diekspor adalah Parent Stock (PS) *Indian River Meat*. Ekspor DOC tersebut dimulai pada Bulan November 2015 dengan jumlah 28.880 ekor jantan dan 187.525 ekor betina.

- Ekspor Produk Unggas ke Jepang

Dalam rangka mempercepat pembangunan nasional, pemerintah terus menggali pendapatan melalui devisa barang-barang yang diekspor, oleh karena itu, pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi peluang ekspor melalui promosi, investasi, dan pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ikut mendorong dan membina peternakan, unit usaha produk hewan, agar berproduksi yang baik dan benar, sehingga produk yang akan diekspor memenuhi persyaratan teknis yang diminta oleh negara pengimpor/negara tujuan ekspor, serta sesuai dengan perjanjian *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).

Untuk kepentingan ekspor, maka setiap negara pengimpor menetapkan peraturan dan persyaratan teknis kesehatan, keamanan dan mutu produk hewan yang akan diekspor, guna melindungi kesehatan manusia, dan lingkungan. Sebagai jaminan bahwa produk hewan yang diekspor tersebut telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan, keamanan, dan mutu untuk dikonsumsi manusia, maka persyaratan teknis tersebut dicantumkan dalam sertifikat kesehatan. Sertifikat tersebut antara lain berupa Sertifikat Kesehatan (*Veterinary Health Certificate/Health Certificate/Sanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan eksportasi produk asal hewan tersebut, maka perlu disusun persyaratan teknis pengeluaran/ekspor produk hewan dan tata cara pengajuan pembuatan *Veterinary Health Certificate* atau *Health Certificate* atau *Sanitary Certificate*, dan lain-lain.



- Ekspor Obat Hewan

Lima tahun terakhir industri obat hewan Indonesia memasuki era baru dengan telah berhasilnya beberapa perusahaan obat hewan menembus pasar internasional, baik dikawasan Asia, Timur Tengah, ataupun Afrika. Upaya mendorong peningkatan ekspor obat hewan ini telah dilakukan dari tahun ke tahun dengan penerapan dan perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor, misalnya penerapan cara pembuatan obat hewan yang baik dan pengujian mutu obat hewan.

Hasil yang telah dicapai dari penerapan CPOHB dan pengujian mutu pada 5 tahun terakhir terlihat dari adanya perkembangan nilai ekspor obat hewan di Kementerian Pertanian yang cukup signifikan yang mendatangkan devisa negara yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat hewan Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk tersebut dapat diterima atau diekspor ke negara-negara di dunia. Data nilai ekspor obat hewan tahun 2010-2015 disampaikan pada Tabel 9

**Tabel 9 Data Nilai Ekspor Obat Hewan Tahun 2010 – 2015 (000 USD)**

No.	Jenis Sediaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Okt)
1.	Biologik	257.407,04	349.915,31	356.213,68	309.978,12	220.594,39	249.018,09
2.	Farmasetik	9.557,78	1.184,40	1.340,14	1.807,75	5.910,65	3.300,12
3.	Premiks	338.104,33	424.416,78	451.924,24	471.675,26	430.000,00	352.686,77
	<b>Total</b>	<b>605.069,15</b>	<b>775.516,49</b>	<b>809.478,06</b>	<b>783.461,13</b>	<b>656.505,04</b>	<b>605.004,98</b>

**Negara tujuan ekspor obat hewan sebanyak 37 negara**

<b>Sediaan Biologik</b>	China, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Pakistan, Nepal, Tanzania, Lebanon, Mesir, Nigeria, Rusia, Syria, Thailand dan Timor Leste
<b>Sediaan Farmasetik</b>	Bangladesh, China, Malaysia, Greece, Mesir, Pakistan, Philipine, Thailand, Vietnam, Nepal, Nigeria, Tanzania, Kamboja dan Myanmar
<b>Sediaan Premiks</b>	Belgium, Burgaria, Croatia, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Lithuania, Montenegro, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Serbi, Slovenia, Syria dan Tunisia

Empat perusahaan eksportir obat hewan adalah : PT. Cheil Jedang Indonesia, PT. Vaksindo Satwa Nusantara, PT. Trow Nutrition Indonesia dan PT. Medion Farma Jaya.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

#### **3.4.1 Realisasi Keuangan**

Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 sebesar Rp 3,13 triliun, anggaran tersebut dialokasikan pada enam kegiatan pokok, yaitu 1) peningkatan produksi ternak sebesar Rp 1,04 triliun; 2) Peningkatan produksi pakan ternak sebesar Rp. 846,97 milyar; 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit sebesar Rp. 367,46 milyar; 4) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis sebesar Rp 400,43 milyar; 5) Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdayasaing sebesar Rp 179,27 milyar dan 6) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp 296,30 milyar.

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2,24 triliun atau 71,45% dari total anggaran Rp 3,13 triliun.

##### **a. Realisasi Per Unit Kerja**

Berdasarkan alokasi anggaran Unit Kerja realisasi anggarannya sebagai berikut: 1) Kantor Pusat sebesar 205,53 milyar atau tercapai 40,18% dari pagu Rp. 511,49 milyar, 2) Kantor daerah sebesar Rp. 887,71 milyar atau tercapai 79,18% dari pagu Rp.1,12 triliun, 3) Dekonsentrasi sebesar Rp. 234,41 milyar atau 82,71% dari pagu Rp. 283,4 milyar, 4) TP Provinsi sebesar Rp. 692,409 milyar atau 71,13% dari pagu Rp. 973,45 milyar, 5) TP Kabupaten sebesar Rp. 220,36 milyar atau 89,52% dari pagu Rp. 246,15 milyar.

##### **b. Realisasi Per Jenis Belanja**

Berdasarkan alokasi anggaran per jenis belanja realisasi anggarannya sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai sebesar 96,37% atau Rp. 137,86 milyar dari pagu sebesar Rp. 143,07 milyar; 2) Belanja Barang sebesar 68,04% atau Rp. 1.82 triliun dari pagu sebesar Rp. 2,68 triliun; 3) Belanja Modal sebesar 88,46% atau Rp 260,71 milyar dari pagu sebesar Rp 294,73 milyar; 4) Belanja Sosial sebesar 99,49% atau Rp 19,40 milyar dari pagu sebesar Rp. 19,5 milyar.

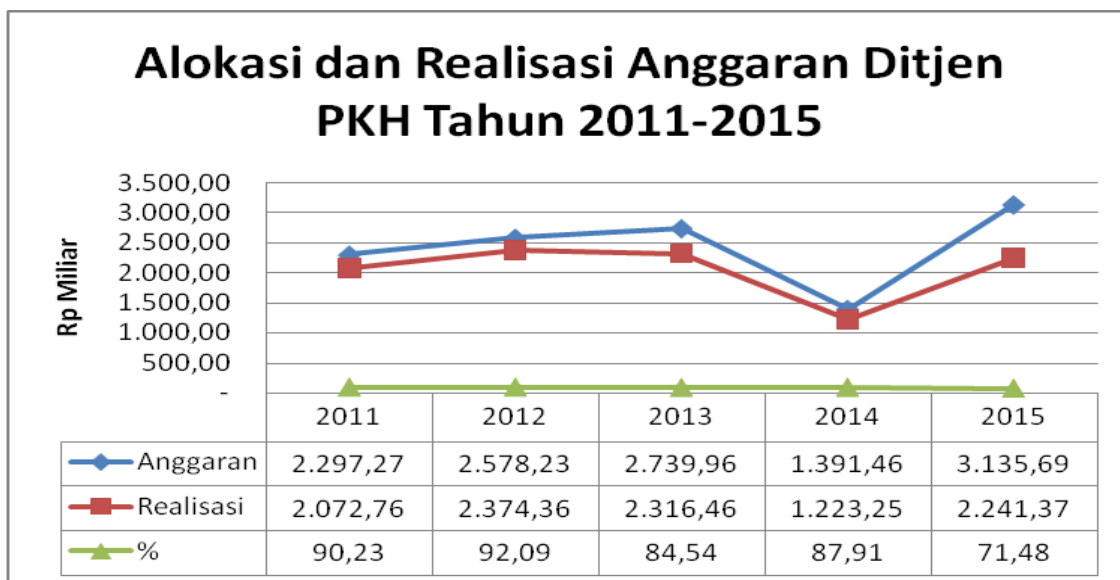
##### **c. Realisasi Per Kegiatan Utama**

Realisasi anggaran per kegiatan utama antara lain: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak terealisasi sebesar 60,70% atau Rp. 634,44 milyar; 2) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak terealisasi sebesar 59,84% atau Rp. 506,79 milyar; 3) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit terealisasi

sebesar 84,25% atau Rp. 309,58 milyar; 4) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 88,25% atau Rp. 353,37 milyar; 5) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdayasaing terealisasi sebesar 88,85% atau Rp. 159,28 milyar; 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 93,47 % atau Rp. 276,95 milyar.

### 3.4.2 Analisis dan Evaluasi Anggaran 2015

Anggaran Ditjen PKH Tahun 2015 sebesar Rp 3,1 triliun, yang terdiri dari APBN reguler dan APBN-Perubahan. Anggaran Tahun 2015 merupakan alokasi anggaran Ditjen PKH terbesar dalam lima tahun terakhir (Gambar 8).



Gambar 8 Trend Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2011-2015

Jika dibandingkan dengan target anggaran yang dituangkan dalam Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019, anggaran tahun 2015 telah mencapai 99,10% dari target.

### 3.5. Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

#### a. Aspek Manajemen dan Administrasi

- 1) Ketersediaan laporan terkait data/informasi produksi dan distribusi DOC oleh Breeder ke wilayah lain tidak/belum dilaporkan dengan

baik kepada Dinas kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan di propinsi.

2) Dinamika arah kebijakan PKH yang berdampak pada:

- a. perubahan struktur organisasi;
- b. revisi anggaran kegiatan strategis yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Utamanya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa strategis yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan belum disosialisasikan dengan baik di daerah (propinsi, kabupaten dan UPT) serta terbatasnya jumlah dan pengalaman penyedia barang dan jasa, menyebabkan beberapa kegiatan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan yang pada akhirnya tidak dapat direalisasikan;
- c. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan baik penetapan pengelola keuangan dan pelaksanaan tender.
- d. Penyedia barang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan dan beberapa kelompok terkendala dengan peraturan Pemda tentang kelompok penerima bantuan ternak harus berbadan hukum.
- e. Beberapa satker tidak mampu melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan

b. Aspek Teknis

1) Aspek perbibitan

- a. Umur pejantan yang ada di Balai Inseminasi buatan rata-rata sudah tua (8-9 tahun), hal tersebut akan menyebabkan penurunan kualitas semen sehingga berakibat kepada penurunan jumlah produksi semen beku yang dihasilkan
- b. Kebijakan terkait peningkatan mutu genetik ternak lokal melalui inseminasi buatan masih mengalami kendala yang diakibatkan oleh dominasi sapi pejantan eksotik relatif masih tinggi (60%) dibandingkan dengan sapi pejantan lokal (40%), disamping itu masih tersedianya stok semen beku sapi pejantan eksotik yang merupakan akumulasi produksi tahun-tahun sebelumnya.
- c. Produksi semen beku dari rumpun sapi pejantan eksotik yang jauh lebih tinggi dari pejantan lokal perlu mendapat perhatian

karena dapat menguras ketersediaan rumpun sapi lokal melalui perkawinan silang yang tidak terarah dan terencana.

- d. Pemahaman tentang penerbitan SKLB masih belum merata ditingkat daerah dan peternak.
- e. Pola produksi bibit secara umum masih dilakukan dengan cara tradisional, sehingga jika dalam pelaksanaannya belum menerapkan GBP salah satunya adalah penerapan biosecurity yang berakibat tingginya tingkat kematian pada ternak.
- f. Untuk mendapat pejantan lokal dengan tujuan replacement bull masih terkendala dengan penyakit sesuai yang dipersyaratkan, mengingat penjarangan bibit pejantan lokal masih dilakukan di kelompok ternak atau masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya guna mendapatkan pejantan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan yang berlaku.

## 2) Aspek pakan

Untuk kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia, pengadaan komponen agro input telah dilaksanakan, sedangkan pengadaan ternak yang ditargetkan sebanyak 15.000 ekor hanya terealisasi 2.078 ekor, yang disebabkan oleh :

- a) Regulasi yang belum tuntas perihal pemasukan sapi indukan (berubahnya Permentan 109 menjadi Permentan 48 dan kemudian Permentan 42).
- b) Ketidaksiapan IKHS di Balikpapan menerima masuknya sapi impor dalam jumlah besar, sehingga terjadi kematian 152 ekor, dan mengakibatkan pihak Australia menunda pengiriman pada shipment berikutnya, sebelum IKHS diperbaiki
- c) Hilangnya momentum ketersediaan sapi di Australia dengan semakin mendekati akhir tahun jumlahnya semakin berkurang dan harga semakin tinggi.

## 3) Aspek budidaya

Hambatan dan kendala ditemui pada kegiatan Pengadaan Indukan Sapi Potong untuk Daerah Integrasi, Padang Penggembalaan dan Ex-Tambang yang tidak dapat terealisasi.

Pedoman indukan baru disahkan dan ditandatangani pada bulan Juni 2015, sehingga SKPD baru dapat melakukan kegiatan di pertengahan tahun 2015. Selama proses tersebut, kegiatan tidak dapat terealisasi ditingkat Provinsi / SKPD sehingga direvisi di Bulan Oktober dengan pagu anggaran Rp. 170.470.294.000,- untuk selanjutnya dilaksanakan ditingkat Pusat. Pada pelaksanaannya proses lelang terselesaikan di bulan November 2015 dan telah mendapatkan pemenang tender, namun pada tahapan realisasi kegiatan selanjutnya Menteri Pertanian meminta kajian kegiatan ini kepada Inspektorat Jenderal dan Tim TP4 Kejaksaan Agung. Berdasarkan pendapat dari Inspektorat Jenderal dan Tim TP4 Kejaksaan Agung tentang pengadaan sapi indukan yang hampir habis waktu pelaksanaannya sampai dengan saat ini hasil lelang dari ULP Kementan belum terselesaikan. Lebih lanjut diperkuat kajian Tim Teknis pengadaan sapi indukan menyatakan ketersediaan waktu yang ada sangat sempit, maka peluang import sapi indukan dari negara asing sulit terealisasi secara normal. Mengingat point tersebut di atas maka kegiatan pengadaan sapi indukan tahun 2015 agar tidak dilanjutkan lagi melalui surat Dirjen PKH Nomor : 03086/PK.010/F/12/2015 ke Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak selaku PPK.

4) Aspek keswan

Penyakit Hewan Menular Strategis(PHMS) adalah merupakan penyakit yang dapat menimbulkan angka kematian dan /atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.

Untuk meningkatkan status kesehatan hewan masalah utama yang di hadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan, keterbatasan Sumber Daya Manusia kesehatan hewan baik jumlah maupun kualitasnya, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya penerapan pengawasan Lalu lintas hewan, anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antara pusat/provinsi/kabupaten/kota belum terpadu, kerjasama lintas sektoral yang belum optimal, pelaksanaan otonomi daerah belum tertata dengan baik sehingga pengendalian dan penanggulangan PHMS masih terbatas oleh kebijakan daerah sedangkan penyakit tidak mengenal batas wilayah dan administrasi.

5) Aspek kesmavet

- a) Keterbatasan jumlah SDM Kesmavet antara lain auditor NKV, Juleha, Butcher, AMPM, PPC, Pengawas Kmv. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendukung SDM bidang kesehatan masyarakat veteriner, baik dalam bentuk kelembagaan maupun penempatan SDM bidang kesehatan masyarakat veteriner. Banyak SDM kesehatan masyarakat veteriner yang telah dilatih di mutasi ke bidang lain. Kurangnya pengadaan SDM kesehatan masyarakat veteriner di daerah, sehingga regenerasi SDM sangat kurang.
- b) Adanya kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan Dekon karena harus melibatkan lintas sektor. Sektor lain seringkali tidak memahami kepentingan yang menjadi tujuan bidang kesehatan masyarakat veteriner. Sebagai contoh kerjasama dengan LPPOM MUI di beberapa propinsi belum dapat dikerjakan dengan baik, mengingat adanya pemahaman yang berbeda antara LPPOM MUI di Pusat maupun di daerah. Sehingga kesepakatan yang telah dibuat ditingkat pusat tidak dapat berjalan di tingkat propinsi.
- c) Mekanisme pencairan anggaran di daerah yang kompleks. Beberapa propinsi PPK kurang koordinatif, sehingga hal ini menyebabkan kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner menjadi terhambat. PengSPJan yang ditutup lebih awal dari ketentuan, sehingga ada beberapa kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner yang tidak terealisasi dengan baik.

### 3.6 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, akan ditempuh berbagai upaya, antara lain:

- a) Melakukan *replacement bull* dengan tujuan mengganti pejantan yang sudah tua dengan yang muda guna meningkatkan produktifitas semen beku yang dihasilkan.
- b) Untuk menjaga kelestarian rumpun sapi lokal perlu penambahan pejantan lokal secara berkelanjutan dan meningkatkan jumlah ekspor semen beku sapi eksotik keluar negeri.
- c) Melakukan sosialisasi dan evaluasi secara kontinyu guna memberikan informasi akan pentingnya penerapan SKLB.

- d) Melakukan pembinaan dalam penerapan produksi bibit sesuai dengan GBP secara kontinyu, terutama dalam penerapan biosecurity di peternak.
- e) Perlu menetapkan jenis penyakit yang wajib bebas pada setiap UPT perbibitan sesuai dengan komoditasnya dan membuat pedoman penanggulangan setiap macam penyakit PHM dan jika dirasa perlu merevisi peraturan terkait kesehatan hewan yang berlaku di UPT perbibitan.
- f) Kegiatan yang didalamnya terdapat komponen pengadaan sapi yaitu Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia dan Pengembangan Padang Penggembalaan, untuk tahun 2016 telah diantisipasi dengan mempersiapkan masuknya sapi impor dalam jumlah besar yaitu telah berkoordinasi dengan Badan Karantina Pertanian terkait pelabuhan pemasukan dan menyiapkan IKH/IKHS, serta mempersiapkan kelompok penerima khususnya terkait penyediaan pakan hijauan dan konsentrat.
- g) Upaya dan tindak lanjut yang dilakukan ketika menemui hambatan dan kendala yang dihadapi baik dalam proses maupun pelaksanaan kegiatan adalah dengan membangun komunikasi yang baik di dalam instansi maupun dengan seluruh pihak yang terkait.
- h) Menambah jumlah SDM kesmavet yang diatur dalam regulasi pemerintah daerah, sehingga regenerasi SDM bidang kesehatan masyarakat veteriner dapat terlaksana dengan baik.
- i) Melakukan sinergitas kebijakan antara Pusat dan Daerah, sehingga pengambilan kebijakan di pusat dan di daerah dapat seragam dan tidak menimbulkan salah persepsi.
- j) Meningkatkan harmonisasi lintas sektoral. Hal ini untuk mendukung kinerja fungsi bidang kesehatan masyarakat veteriner yang secara fakta, keberhasilan dan berjalannya fungsi kesehatan masyarakat veteriner memerlukan dukungan sektor lain.



#### IV. PENUTUP

Capaian sasaran strategis Ditjen PKH pada tahun 2015 termasuk kategori berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis delapan indikator yang rata-rata lebih dari 81%, dengan kisaran 56,3% – 105,85 %. Indikator yang memiliki capaian >100% adalah produksi daging sapi/kerbau, produksi susu, peningkatan status kesehatan hewan, jumlah sertifikat, dan nilai tukar peternakan. Sedangkan indikator yang capainnya <100% adalah produksi daging ternak lainnya, produksi telur, dan ekspor ternak hidup babi.

Pada tahun 2016 Ditjen PKH akan lebih meningkatkan capaian kinerja melalui beberapa kegiatan strategis seperti pengadaan indukan sapi impor yang bertujuan untuk menambah populasi nasional, kegiatan sentra peternakan rakyat (SPR), pengadaan ternak lokal, serta penanganan gangguan reproduksi dan GBIB.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 tidak terlepas dari dukungan seluruh kegiatan yang ada di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi

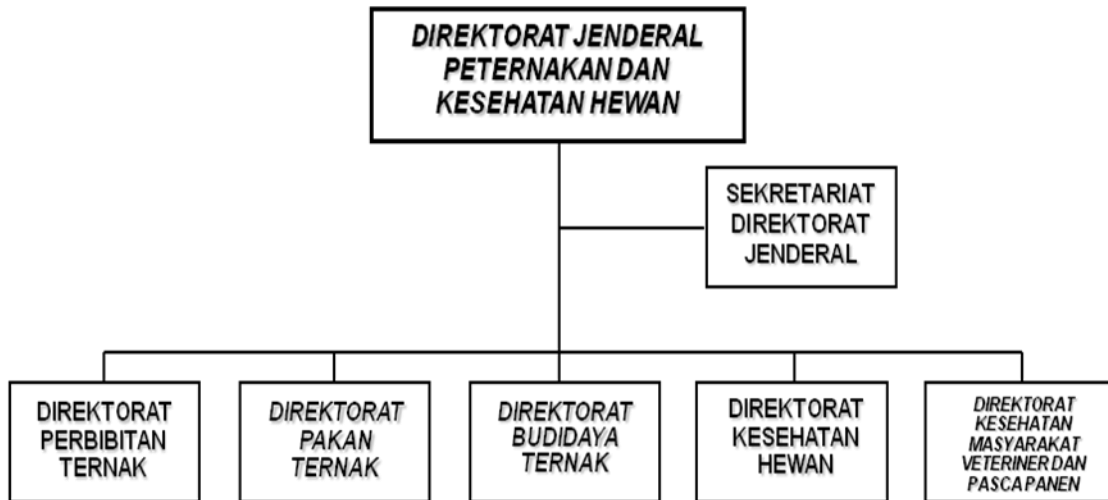
i capaian target indikator, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders pembangunan peternakan, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan peternakan, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terletak pada komitmen dan kerja sama bersama, baik Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan peternak.

## LAMPIRAN

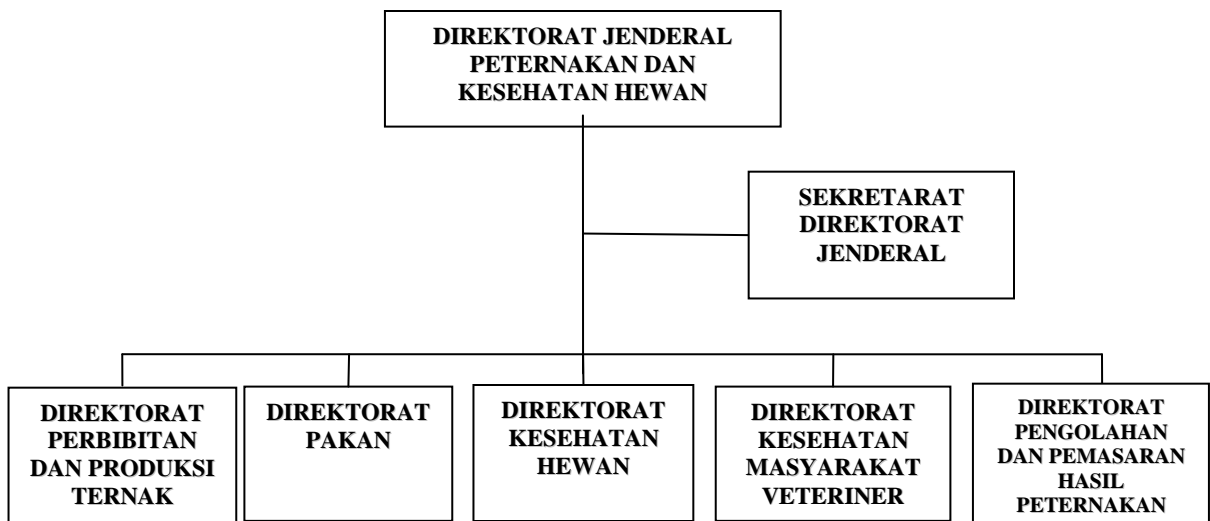
Lampiran 1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010



Sumber : Dijen PKH

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015



Sumber : Dijen PKH

Lampiran 2. Rekapitulasi SDM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jenjang Pendidikan										
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2015	20	479	471	21	10	233	2	847	75	113	<b>2.271</b>
2	2014	18	455	447	20	10	205	2	842	81	116	2.196
3	2013	15	458	421	17	12	184	2	844	87	120	2.160
4	2012	17	440	445	17	15	191	4	884	93	134	2.240
5	2011	17	460	461	13	19	192	4	944	97	154	2.361
6	2010	16	364	482	8	22	128	3	992	106	169	2.290

Sumber : Dijen PKH

Lampiran 3 Kegiatan tahun 2010-2015 dalam rangka Peningkatan Produksi Daging Sapi/Kerbau 2015

No	Kegiatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015		%
							Target	Realisasi	
1	Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting (klp)	125 klp	2.064	2.008	1.070	237	195	194	99,49
2	Pembibitan Sapi/kerbau (klp)	413	40	64	163	49	56	56	100
3	Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia (klp)	20	76	95	230	131	638	562	83,39
4	Pengembangan Hijauan Pakan (di UPT Pusat dan kelompok)(Ha/stek)								
	UPT Pusat	-	-	-	224 Ha	444 Ha	930 Ha	1.143	122,90
	UPTD	-	13 Lok	23 Lok	27 Lok	12 Lok	14 Lok /640 Ha	14 Lok /702 Ha	109,68
	Kelompok	-	22	19 klp	33 klp	24 klp	30 Klp/60 Ha	29 Klp/68 Ha	96,67 /113,33
5	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (juta stek)	-	-	-	2,81	3,71	5,87	5,67	96,59
6	Pengembangan Padang Penggembalaan	-	-	-	1.189 Ha	245 Ha	700 Ha	700 Ha	100
7	Pengembangan Pakan Konsentrat Sapi Potong melalui UPPR, LPR,UBP, Revitalisasi UPP/LP/ PPSK	-	59 Klp	145 Klp	91 Klp	84 Klp	88 Klp	84 Klp	95,45
8	Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR	150 orang	100 orang	1.166 orang	1.907 orang	751 orang	150 orang	151 orang	100,67
9	Penyebaran Pejantan Sapi Potong INKA	-	1.009 ekor	5.755 ekor	2.298 ekor	971 ekor	1.798 ekor	2.142 ekor	119,13
10	Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan (IB)	200 unit	600 unit	3.269 unit	434 Unit	318 unit	270 unit	243 unit	90,0
11	Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)	2.656.260 dosis	1.830.552 dosis	2.606.531 dosis	1.115.605 dosis	1.270.031 dosis	1.625.535 dosis	932.386 dosis	57,4
12	Sinkronisasi Birahi (GBIB/APBN-P)	-	-	-	-	-	691.000 ekor	410.599 ekor	59,42
	Sinkronisasi Birahi (Reguler/APBN)	-	-	-	-	-	31.900 ekor	25.396 ekor	79,61

13	Produksi semen beku	5 juta Dosis	5,3 juta dosis	4,16 juta dosis	5,19 juta dosis	4,81 juta dosis	4,80 juta dosis	3,81 juta dosis	79,44
14	Pengembangan Indukan Sapi	-	-	7.760 ekor	2.170 ekor	300 ekor	-	-	-
15	Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau dan Penyakit Parasiter	21.040 dosis	50.095 dosis	153.186 dosis	536.341 dosis	337.746 Dosis	300.000 dosis	247.032 dosis	82,34
16	Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan	-	-	35 unit	103 unit	39	40	33	82,5 %
	Jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia	889 unit	933 unit	999 unit	1194 unit	1229 unit	40 unit	1262 unit (meningkat 33 unit dari tahun 2014)	
17	Fasilitasi RPH	29	23	24 paket	42 Paket	16 unit	23	23	100
18	Fasilitasi Kios Daging	10 unit	15 unit	22 Unit	30 Unit	20 unit	-	-	-

Sumber data: Ditjen PKH, 2015

Lampiran 4. Jumlah Sertifikat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2015

No	Uraian	Jumlah Sertifikat					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pakan						
2	Keswan						
3	Perbibitan	-	-	-	120	116	15.724
4	Kesmavet	1.153	3.995	4.260	4.845	5.242	5.293
TOTAL							
PERSENTASE							